

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam dunia bisnis laporan keuangan merupakan salah satu media komunikasi yang berisi sumber informasi yang digunakan untuk mengetahui kondisi serta kinerja suatu perusahaan. Menurut PSAK No. 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Informasi dari laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Keberadaan laporan keuangan juga diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk dapat mengambil keputusan di mana laporan keuangan tersebut menjadi landasan atas keputusan yang diambil. Laporan keuangan juga dapat dikatakan sebagai hasil pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak manajemen terhadap penggunaan atas seluruh sumber daya yang ada (Waluyo, 2016).

Laporan keuangan mengandung salah satu aspek penting yang digunakan untuk menilai seberapa baik atau tidaknya kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu informasi laba. Putri & Kadarusman (2021) menjelaskan bahwa dengan melihat dan mengevaluasi informasi laba yang terdapat pada laporan keuangan, pengguna diharapkan dapat memberikan penilaian seberapa baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan agar dapat mengetahui tingkat profitabilitas dan

rentabilitas yang dimiliki perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif (Munawir, (2016).

Informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba penting karena hal tersebut dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai laba seharusnya benar-benar menggambarkan keadaan keuangan perusahaan seadanya secara transparan tanpa adanya rekayasa (P. P. D. Putri & Herawati, 2021). Namun, pada keadaan sebenarnya beberapa pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan yang berbeda-beda, seperti pemilik perusahaan berkepentingan terhadap pertumbuhan modal yang ditanamkan, pihak manajemen berkepentingan atas bonus atau *reward* yang akan didapatnya, dan juga pemerintah yang berkepentingan atas besarnya pajak yang akan dipungut. Kepentingan-kepentingan para pengguna laporan keuangan inilah yang kerap memotivasi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba (I. D. Putri & Kadarusman, 2021).

Pemilik perusahaan yang berkepentingan terhadap modal yang ditanamkan, memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan tercapainya tingkat *return* atas modal yang telah ditanamkan tersebut. Sedangkan untuk kepentingan pihak manajemen perusahaan atas bonus atau *reward* yang akan didapat memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Dengan manajemen laba dapat

tercapai tingkat laba yang menjadi target sehingga akan didapatkan bonus atau *reward* atas tercapainya target tersebut. Untuk pemerintah yang berkepentingan atas pembayaran pajak, memotivasi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan agar pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dalam jumlah yang seminimal mungkin. Untuk mencapai suatu target laba, biasanya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk memaksimalkan jumlah laba demi tercapainya kepentingan pihak manajemen perusahaan dan kepentingan-kepentingan pihak lainnya (Trijovianto, 2021).

Manajemen laba merupakan upaya pihak manajemen perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan guna memberikan pandangan yang baik kepada pemegang kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Sulistyanto, (2016). Beberapa pihak memandang praktik manajemen laba dari dua sudut pandang yang berbeda. Salah satu pihak memiliki anggapan bahwa manajemen laba termasuk tindakan kecurangan (*fraud*). Alasannya adalah pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku oportunistis, di mana manajerial memperlakukan komponen yang ada pada laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, terdapat pihak yang memiliki anggapan bahwa manajemen laba bukan merupakan tindakan kecurangan. Hal ini dikarenakan manajemen laba merupakan dampak dari kebebasan pihak manajemen dalam memilih metode-metode akuntansi yang diterapkan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan

yang dianggap sesuai untuk perusahaan. Kebebasan penerapan metode akuntansi ini disebabkan oleh beragamnya metode dan prosedur akuntansi yang diakui serta diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) (Sulistyanto, 2016).

Manajemen laba yang termasuk dalam tindak kecurangan merupakan tindakan yang dapat mengelirukan seluruh pengguna laporan keuangan serta menimbulkan asimetri informasi yang berpotensi menciptakan kesenjangan antar pemilik dan manajemen perusahaan, sehingga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan ke arah yang salah (Scott, 2015). Penerapan manajemen laba yang termasuk dalam tindak kecurangan akan berdampak negatif terhadap perusahaan, di samping itu juga akan merugikan pihak eksternal lain yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti investor. Sulistyanto (2016) menyatakan bahwa ada berbagai kerugian yang terpaksa harus ditanggung oleh berbagai pihak akibat dari praktik manajemen laba yang dilakukan. Pertama, perusahaan pada suatu saat akan kehilangan kemampuan untuk melanjutkan rekayasa keuangan ini, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan, apabila hal ini dilakukan dalam jangka panjang maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Kedua, bagi *stakeholder* yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan akan memperoleh informasi palsu sehingga keputusan-keputusan strategis dan ekonomis yang dibuatnya pun menjadi keliru. Kekeliruan semacam ini tidak hanya merugikan bagi *stakeholder* yang bersangkutan tetapi secara tidak langsung juga harus ditanggung oleh publik

yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan. Kekeliruan ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya kepada pihak-pihak yang tidak tepat.

Dewasa ini manajemen laba yang termasuk dalam tindak kecurangan masih menjadi fenomena yang sering terjadi di perusahaan. Salah satu perusahaan yang telah terlibat kasus terkait dengan penerapan manajemen laba adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). AISA adalah salah satu perusahaan sektor barang konsumen primer (*Consumer Non-Cyclicals*) yang merupakan produsen makanan di Indonesia. AISA melakukan rekayasa keuangan dengan ditemukan adanya *overstatement* pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap (Gulo & Mappadang, 2022). Dikutip dari CNBC Indonesia (2019), kronologi awal praktik ini terjadi ketika dua anak perusahaan AISA yaitu PT Indo Beras Unggul dan PT Jati Sari Rezeki melakukan praktik kecurangan penjualan beras dengan memproduksi beras yang tidak sesuai dengan keterangan label. Kejadian ini menyebabkan AISA mengalami penurunan penjualan, kesulitan keuangan, serta perusahaan tidak mampu untuk membayar bunga dan pokok obligasi yang berujung gagal bayar. Adanya kejadian ini membuat pihak manajemen perusahaan berniat untuk mempercantik laporan keuangan pada laporan keuangan tahun 2017. Pada akhir 2018, atas dasar keputusan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perusahaan menunjuk Ernst & Young untuk melakukan pemeriksaan kembali pada laporan keuangan tahun 2017 yang sebelumnya telah di audit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf. Dari pemeriksaan tersebut

ditemukan bahwa terdapat penggelembungan dana sebesar Rp5 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap milik AISA untuk tahun buku 2017. Selain itu, terdapat aliran dana dengan skema yang tidak jelas dari AISA kepada pihak-pihak afiliasi manajemen lama. Dengan terbuktinya kasus manajemen laba yang dilakukan manajemen lama AISA tersebut, kemudian pihak komisaris mengadakan RUPSLB yang memutuskan untuk membentuk manajemen baru perusahaan dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib (Soenarso & Mahadi, 2021).

Fenomena manajemen laba lain juga terjadi pada PT Inovisi Infracom (INVS). Dalam DetikFinance (2015) dijelaskan bahwa dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS pada 2015, ada delapan item laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan dan jumlah utang atau kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan bahwa terdapat salah saji pada item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) utang bersih kepada pihak berelasi dalam laporan arus kas INVS. Setelah pihak Bursa Efek Indonesia mendapati temuan-temuan tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia mensuspensi saham INVS.

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan beberapa faktor yang dianggap mampu mempengaruhi manajemen laba. Pada penelitian Cahyadi & Davianti (2020), faktor penyebab manajemen laba diklasifikasikan menjadi

dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. Faktor internal ini dapat terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan perencanaan pajak (Riyanto & Puji Setiawati, 2022). Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. Faktor eksternal dapat meliputi kualitas audit dan ukuran KAP.

Pada penelitian ini, Peneliti akan menganalisis variabel yang termasuk ke dalam faktor internal dalam memengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan. Faktor internal dianggap menjadi faktor yang sering kali menjadi motivasi perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Dan dari beberapa penelitian terdahulu, Peneliti masih menemukan hasil yang berbeda terkait dengan pengaruh perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris independen sebagai faktor internal terhadap manajemen laba.

Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi manajemen laba adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam praktiknya, perusahaan dihadapkan oleh dua kepentingan yang berlawanan saat melakukan manajemen laba. Kepentingan yang pertama adalah pihak manajemen perusahaan berupaya untuk menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan menghasilkan laba yang maksimal untuk dilaporkan kepada *stakeholders*. Sedangkan yang kedua, manajemen perusahaan juga ingin melaporkan laba kena pajak untuk keperluan pajak seminimal mungkin (Fitriany et al., 2016).

Sebagai upaya untuk meminimalkan biaya pembayaran pajak, maka pihak manajemen cenderung untuk memperkecil laba kena pajak pada laporan keuangan. Dengan kecilnya jumlah laba kena pajak, maka pajak yang dikenakan akan lebih kecil pula.

Penelitian Hendrata et al (2019) dan Faqih & Sulistyowati (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya semakin tinggi tingkat efektivitas perencanaan pajak perusahaan, maka menunjukkan semakin tinggi pula indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak dalam jumlah besar sesuai laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan manajemen laba dengan meminimalisasi laba kena pajak. Upaya meminimalisasi pajak yang merupakan unsur pengurang laba tersebut termasuk ke dalam perencanaan pajak. Dengan tingginya tingkat perencanaan pajak yang dilakukan, maka mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan praktik manajemen laba untuk mencapai tujuan yaitu meminimalisasi beban pajak yang akan dibayarkan.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Trijovianto (2021), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ini berarti semakin besar nilai perencanaan pajak maka nilai manajemen laba akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena perusahaan cenderung tidak ingin membayar pajak yang dalam jumlah besar, sedangkan disisi lain perusahaan memiliki tujuan untuk menaikkan laba

perusahaan guna mencapai kepentingannya. Perencanaan pajak yang dilakukan akan menurunkan laba kena pajak, dimana itu berarti juga menurunkan laba perusahaan. Sehingga dengan turunnya laba perusahaan, maka tujuan manajemen perusahaan untuk menaikkan laba perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian, dengan tingginya perencanaan pajak pada perusahaan, maka mengindikasikan bahwa manajemen laba cenderung tidak dilakukan.

Sedangkan menurut Achyani & Lestari (2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini artinya semakin tinggi atau rendahnya nilai perencanaan yang dihasilkan, tidak akan memengaruhi tindakan manajemen laba pada perusahaan. Hal ini disebabkan karena di dalam perusahaan manufaktur terdapat beberapa divisi dengan masing-masing manajemen. Hal ini akan membuat kecenderungan manajemen akan mementingkan kepentingannya masing-masing dalam hal memperoleh bonus atau *reward* apabila menunjukkan kinerja yang baik. Sehingga manajemen laba yang terjadi cenderung karena *self interest* manajemen sendiri bukan karena perencanaan pajak yang menjadi kepentingan *principle* (pemilik perusahaan). Karena perencanaan pajak merupakan keinginan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menginginkan dividen yang tinggi, dengan mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin. Sehingga ada tidaknya perencanaan pajak, tidak memengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba.

Selain perencanaan pajak, *leverage* juga dianggap dapat memengaruhi manajemen laba. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* menggambarkan bahwa perusahaan semakin mengalami kesulitan dalam menghadapi perjanjian utang. Investor beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat rasio *leverage* yang tinggi memiliki risiko pembayaran utang yang tinggi pula (Suffah & Riduwan, 2016). Tingginya tingkat rasio *leverage* akan menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan agar dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi perjanjian utang yang ada.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Herawati (2021) dan Fandriani & Tunjung (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* dan manajemen laba. Ini berarti semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan semakin tinggi pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan tingkat *leverage* yang tinggi, manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba untuk dapat menaikkan laba perusahaan. Manajemen akan berusaha untuk melakukan beberapa cara yang dapat meningkatkan nilai aset perusahaan, seperti mengurangi jumlah utang atau meningkatkan pendapatan sehingga laba perusahaan akan mengalami peningkatan. Tindakan ini dilakukan guna mengurangi risiko menurunnya kepercayaan para investor pada kemampuan perusahaan karena tingginya

tingkat *leverage*. Serta menunjukkan kepada kreditor bahwa perusahaan masih mampu membayar kewajibannya.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Rosena et al (2016), di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka potensi dilakukannya manajemen laba akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena tingkat *leverage* yang tinggi menghalangi manajemen dalam melakukan perubahan laporan laba. Ketika perusahaan menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasi, maka *leverage* akan membatasi pengeluaran yang tidak optimal dan menempatkan perusahaan di bawah pengawasan yang lebih ketat oleh pemberi pinjaman. Kreditor juga akan meminta laporan keuangan yang lebih kredibel, sehingga dengan tingginya tingkat *leverage* manajemen perusahaan cenderung tidak melakukan manajemen laba.

Sedangkan menurut Purnama (2017), yang telah melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015 bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini dapat diartikan bahwa dalam penelitian tersebut semakin tinggi atau rendahnya *leverage* tidak akan memengaruhi manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur yang menjadi sampel tidak tergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaannya, sehingga tidak memberi pengaruh terhadap keputusan manajemen perusahaan dalam pengaturan jumlah laba yang akan dilaporkan apabila terjadi pada tingkat utang.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi manajemen laba adalah proporsi dewan komisaris independen. Adanya komisaris independen diharapkan dapat mencegah manajemen laba yang berlebihan dengan penerapan *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan. Komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham minoritas juga diharapkan untuk bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Dalam arti komisaris independen tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan apa pun dengan direksi dan komisaris perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab kualitas pelaporan keuangan terletak pada efektivitas peran dewan komisaris independen.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan proporsi dewan komisaris independen dengan manajemen laba sangat beragam. Rahma Febrina et al (2018) melakukan penelitian mengenai hubungan praktik *Good Corporate Governance* dengan manajemen laba menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ini berarti semakin banyak jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan, mengindikasikan perusahaan dapat melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin dilakukan hanya untuk mengendalikan bisnis saja, namun tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance*

dalam perusahaan. Sehingga dengan kurangnya peran pengawasan oleh komisaris independen karena tidak bermaksud untuk menerapkan *Good Corporate Governance*, mendorong pihak manajemen untuk tetap melakukan praktik manajemen laba guna mencapai kepentingannya.

Nabila & Daljono (2013) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ini berarti dengan banyaknya jumlah dewan komisaris pada suatu perusahaan akan menekan upaya praktik manajemen laba pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris independen merupakan pihak independen yang tidak memiliki ikatan atau kepentingan terhadap pihak manajemen, sehingga terbebas dari tekanan dan intervensi manajerial. Semakin banyaknya pihak independen dalam komisaris, maka proses pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen akan semakin berkualitas seiring dengan banyaknya tuntutan pihak independen yang menginginkan adanya transparansi. Pengawasan yang semakin ketat ini akan semakin mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Indah & Pratomo (2022) mengemukakan pendapat berbeda, dinyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini berarti banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak memengaruhi adanya manajemen laba pada suatu perusahaan. Hal ini memiliki beberapa penyebab. Pertama, besarnya dewan komisaris independen perusahaan menimbulkan komunikasi yang tidak efektif sehingga dapat mengganggu proses pengawasan yang dilakukan

terhadap pihak manajemen terkait dengan penerapan *good corporate governance* termasuk didalamnya pencegahan adanya praktik manajemen laba yang termasuk dalam kecurangan. Kedua, pengambilan keputusan menjadi tidak efisien dalam dewan komisaris independen yang besar dibandingkan dengan dewan komisaris independen yang kecil, karena dimungkinkan akan lebih banyak perbedaan pendapat antar anggota dewan komisaris independen. Terakhir, dewan komisaris independen tidak memiliki keahlian yang cukup dalam melaksanakan setiap tugasnya. Oleh karena beberapa penyebab tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak memengaruhi adanya praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, dengan adanya fenomena kasus manajemen laba yang masih terjadi pada perusahaan di Indonesia khususnya pada sektor barang konsumen primer (*Consumer Non-Cyclicals*), serta beberapa penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak, *Leverage*, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba”**.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap

manajemen laba. Dalam beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan hasil yang inkonsisten terkait dengan pengaruh perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba.
3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Manfaat Literatur

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kembali pengaruh variabel perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan

komisaris independen terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan penelitian selanjutnya terkait dengan manajemen laba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung teori agensi menjadi dasar teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen laba.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui tindakan manajemen laba yang dapat merugikan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menghindari tindakan manajemen laba yang merugikan tersebut.

### b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi investor untuk lebih mempertimbangkan variabel perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris independen dari suatu perusahaan dalam mengidentifikasi praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan pihak manajemen perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan regulasi serta melakukan pengawasan di Bursa Efek Indonesia, terdapat potensi suatu perusahaan dalam melakukan manajemen laba dengan memperhatikan variabel perencanaan pajak, *leverage*, dan proporsi dewan komisaris independen.

